

TAJUK : ESAI

JUDUL : SEGENGAM ASA MEMBANGUN MUTU MELALUI 'PINTU' KEPALA SEKOLAH

PENULIS : SELVIES LEA BABUTTA, S.SI, M.PD

JABATAN : WIDYAISWARA MUDA – LPMP SULTRA



Berbicara tentang mutu pendidikan seperti membahas cerita film bersambung yang tidak ada habisnya dan selalu saja ada episode-episode menarik untuk diperbincangkan. Semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, baik para pakar pendidikan, praktisi, guru, kepala sekolah maupun pemerintah dari tingkat pusat sampai pada pemerintah daerah. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda tetapi tidak jarang juga tanggung jawab yang sama dipikul oleh lebih dari 2 atau 3 pihak agar pihak-pihak yang terkait dapat bersinergi dan membangun jejaring ke arah yang konstruktif.

“*Mutu is everybody business*”, slogan itu yang sering kita dengar sehingga tidak membatasi dan membagi bidang apapun ketika berbicara mutu. Demikian halnya dalam dunia pendidikan, mutu adalah sebuah harapan, keinginan, dan tuntutan bahwa pendidikan kita semakin hari harus semakin berbenah untuk meningkatkan kualitas lulusan, layanan, dan profesionalisme.

Peran Kepala Sekolah

Sekolah merupakan tempat proses nyata dari jejak rekam pembenahan dalam peningkatan kualitas dan salah satu figur strategis yang sangat penting adalah adanya kepala sekolah yang profesional yang mempunyai tanggung jawab dengan peran yang sangat kompleks sebagai seorang *leader, teacher, supervisor, manajer, inspirator, motivator, fasilitator, agent of change*, dan segudang peran lainnya dengan yang tidak melepaskan dari harapan bahwa seorang kepala sekolah juga diharapkan sebagai *vibrator*, yaitu sebuah peran yang merujuk pada kemampuan untuk menggerakkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah.

Kepala sekolah harus mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sekolah, baik pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, lingkungan dan 'iklim' sekolah yang kondusif termasuk dengan orang tua peserta didik, lingkungan maupun masyarakat dalam rangka mencapai prestasi akademik dan non akademik secara maksimal dan menjadi penyumbang keberhasilan dalam penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan Indonesia. Keberhasilan kepala sekolah sangat ditentukan oleh penguasaan kompetensi dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya sebagai kepala sekolah. Dengan kata lain sekolah harus dipimpin oleh orang yang benar-benar kompeten, baik dalam aspek kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan, maupun supervisi.

Melihat tantangan dan harapan masa kini

Suatu pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana mencapai harapan tersebut jika harapan yang diinginkan sedemikian idealnya sebagai seorang kepala sekolah?. Untuk menjawab pertanyaan ini memang bukanlah perkara mudah seperti menjawab soal perkalian hasilnya langsung dapat diketahui, didalamnya perlu kajian yang mendalam dan rencana tindak lanjut yang melewati proses yang panjang dan memerlukan waktu yang tidak singkat, kalau menarik benang merahnya kita perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi selama ini mengapa harapan ini sebagian besar masih merupakan tantangan yang mesti dihadapi.

- **Masih lemahnya kekuatan regulasi**

Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi melalui peraturan menteri dalam kerangka membangun dan memperkuat kepala sekolah yang kompeten, yakni: (1) **Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah**, mengatur tentang persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah; (2) **Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah**, terdiri dari 20 pasal yang antara lain mengatur syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, penyiapan calon kepala sekolah, proses pengangkatan, masa tugas, PKB dan PKG serta mutasi dan pemberhentian kepala sekolah.

Dengan diterbitkannya kedua peraturan ini merupakan moment penting yang memuat pesan dan amanat yang bila ditilik dapat dipandang sebagai upaya dalam menciptakan kepala sekolah yang sesuai dengan harapan, salah satunya adalah bahwa pengangkatan kepala sekolah dibidik dari proses perekrutan kepala sekolah itu sendiri dimana seorang calon kepala sekolah terlebih dahulu melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan pihak kabupaten/kota untuk merekomendasikan guru-guru yang memiliki kompetensi dan kinerja baik berdasarkan proyeksi kebutuhan kabupaten/kota dalam kegiatan seleksi akademik yang selanjutnya bila berpotensi, guru-guru tersebut mengikuti proses pelatihan yang tidak hanya dibekali dengan teori dan konsep semata terkait kompetensi yang diperlukan saat mereka menjadi kepala sekolah seperti kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan, maupun supervisi tetapi juga adanya proses praktik baik pada sekolah sendiri maupun sekolah lain dalam rangka menimba pengalaman lapangan.



Seleksi akademik yang diikuti pada program penyiapan calon kepala sekolah

Sumber : Dokumentasi pribadi

Tetapi pada kenyataannya bahwa regulasi ini tidak mampu menarik perhatian sebagian besar dari pemerintah daerah karena sudah menjadi rahasia umum bahwa pendidikan juga memegang peran strategis dalam baik dari segi kepentingan maupun pengaruh politik praktis di daerah sehingga mengabaikan peraturan yang ada terkait pengangkatan kepala sekolah. Kepala sekolah digunakan sebagai “penjaring dukungan” dalam pemilihan dan juga sebagai “hadiah politik” bagi guru yang menjadi pendukung tim pemenang dan bukan atas dasar kinerja maupun kemampuan, hal ini menjadi perhatian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang dikutip dari laman kabar24bisnis.com bahwa kepala sekolah adalah jabatan karir sehingga pengangkatan kepala sekolah seharusnya berdasarkan pertimbangan kemampuan bukan alasan politis, dan kenyataannya bahwa pemerintah daerah lebih patuh terhadap peraturan daerah (perda), peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbup) dan sebagainya.

Apabila ditinjau dari hierarki perundang-undangan, Permendikbud berada dibawah Peraturan Pemerintah (PP) sehingga selain alasan politik praktis, secara kekuatan hukum memang dianggap lemah untuk mengikat daerah untuk mengikuti ketentuan dalam permendikbud. Dipihak lain pemerintah daerah juga memegang Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang didalam Bab VI yang mengatur tentang pengangkatan, penempatan dan pemindahan guru yang didalamnya dituliskan bahwa: *“Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan”*. Tidaklah mengherankan ketika pemerintah daerah cenderung mengabaikan dan tidak mematuhi aturan-aturan yang ada terkait pengangkatan kepala sekolah, ditambah lagi terbitnya aturan-aturan dalam bentuk Peraturan Menteri sangat lekat dengan perubahan birokrasi sehingga opini yang muncul “ganti menteri, ganti kebijakan” sudah menjadi skema yang mengemuka.

Harapan kedepan adalah kedudukan permendikbud dapat disetarakan dengan peraturan pemerintah (PP), atau sekurangnya dilakukan revisi atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 dalam hal pengangkatan kepala sekolah. Apabila perubahan yang terjadi terhadap aturan-aturan yang telah ada, diperlukan proses evaluasi dan kajian yang lebih mendalam terhadap aturan tersebut agar apa yang menjadi kekuatan ataupun kelemahan dapat menjadi bahan rekomendasi menuju perbaikan yang diinginkan.

- **Belum berkembangnya budaya mutu**

Begitu banyak definisi mutu yang dapat kita cermati, ditinjau dari arti katanya mutu berasal dari bahasa inggris *quality* yang diterjemahkan sebagai kualitas. Direktorat jendral pendidikan dasar dan menengah (Dit.Dikdasmen) menyatakan bahwa Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.

Mutu dalam pengertian relatif bukanlah suatu sebutan untuk suatu produk atau jasa, tetapi pernyataan bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi persyaratan atau kriteria, atau spesifikasi yang ditetapkan.

Produk atau jasa tersebut tidak harus terbaik, tetapi telah memenuhi standar yang ditetapkan. Disisi lain dapat dilihat dari dua aspek yaitu mutu diukur dan dinilai berdasarkan persyaratan kriteria dan spesifikasi (standar-standar) yang telah ditetapkan lebih dahulu. Berikutnya adalah pemahaman dalam mengakomodasi keinginan konsumen atau pelanggan terhadap suatu layanan yang intinya dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan, karena bicara mutu bukanlah semata pada produk atau hasilnya tetapi pada proses yang berjalan.

Jika kita menarik korelasinya dalam membangun kepala sekolah yang berkualitas adalah bahwa pengangkatan ataupun jabatan kepala sekolah juga perlu mengikuti persyaratan, kriteria dan standar-standar yang telah ditetapkan baik dalam proses perekrutan, pelaksanaan tugas, maupun hasilnya. Dimana tidak melepaskan unsur evaluasi dan disertai perbaikan secara terus menerus yang bertujuan untuk memberikan layanan yang prima baik bagi internal sekolah peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan maupun eksternal sekolah dalam hal ini orang tua, masyarakat dengan memberdayakan sumber daya yang ada.

Komitmen Meraih Harapan

Tantangan terbesar dari suatu proses pembenahan terkait dengan membangun kepala sekolah yang berkualitas adalah adanya komitmen dari semua pihak dalam melakukan sinergitas yang ada, mulai dari pemerintah pusat, propinsi sampai pada kabupaten/kota. Kalau bicara tentang sebuah komitmen maka kita sementara berbicara bukan hanya sekedar lisan semata tetapi sebuah tekad yang kuat dan diikuti dengan sebuah tindakan nyata. Komitmen merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Kalau saja semua pihak memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas akan memberikan warna yang berbeda dalam dunia pendidikan kita, walaupun harus diakui bahwa setiap perubahan kearah perbaikan akan menimbulkan 'riak-riak' disisi lain tetapi poin penting yang dapat dilihat bahwa riak-riak yang timbul dapat saling melengkapi semua pihak untuk dapat saling bersinergi.

Tidak ada kata terlambat untuk sebuah harapan bahwa sekolah-sekolah indonesia dipimpin oleh kepala sekolah yang profesional dengan yang tidak hanya mampu memimpin tetapi juga memberikan teladan. Begitu banyak pintu untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan semua 'pintu' perlu pembenahan tetapi sedikit tidaknya melalui perubahan baik secara pemikiran maupun tindak lanjut yang dilakukan semua pihak akan mendapatkan hasil yang diinginkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

If you focus on results, you'll never change. If you focus change, you'll get results.

Jika anda fokus pada hasil, anda tidak akan pernah berubah. Jika anda fokus pada perubahan, anda akan mendapatkan hasilnya.